



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2024

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA**

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Adisucipto KM. 15,2 Telp/Fax. (0561) 725546
Email : dkumppkkr@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra Perubahan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman di dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk periode Tahun 2019 ke depan.

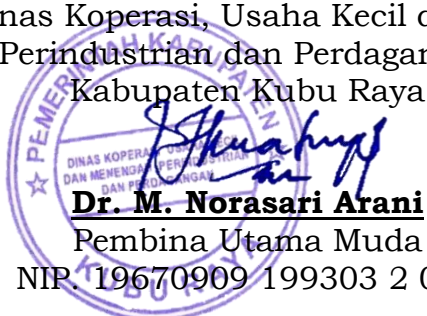
Penyusunan Renstra Perubahan ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya kami menyadari bahwa Renstra Perubahan ini sangat berpengaruh pada keberhasilan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya didalam mencapai tujuan dan menunjang pengambilan kebijakan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta mendukung pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan lancarnya perdagangan serta perindustrian di Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan mengiringi upaya kita dalam melakukan tugas pengabdian kepada daerah, masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, 28 Februari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya



Dr. M. Norasari Arani
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199303 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu diperlukan juga Peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perbuahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2019-2024.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Kubu Raya.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud Dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.
- 2.2. Sumber Daya.
- 2.3. Kinerja Pelayanan.
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.
- 3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
- 3.3. Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat.
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DKUKMPP

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan pilihan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan program di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang – undangan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun Rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan laporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Dinas;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas rencana kerja dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan;
- Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan keuangan;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian dan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan Penyusunan program operasional kerja di Bidang Koperasi;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Usaha Mikro;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha Mikro sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia;

- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Usaha Mikro;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- perencanaan dan penyusunan program operasional program kerja di Bidang Perdagangan;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perdagangan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bidang Perdagangan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bina usaha industri kecil dan

menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- perencanaan dan penyusunan program operasional program kerja di Bidang Perindustrian;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perindustrian sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industr;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bidang Perindustrian;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi (1) satu atau beberapa Kecamatan. Dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah UPTD Metrologi Legal.

2.2 Sumber Daya DK-UMPP

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 53 orang personil dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.1

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2022

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	8 Orang	13,11 %
2.	S-1	35 Orang	57,37 %
3.	Diploma	5 Orang	8,19 %
4.	SLTA	13 Orang	21,31 %
5.	SLTP	-	0 %
Jumlah		61 Orang	100 %

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kubu Raya, 2022.

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) sebanyak 35 orang atau 57,37 % dan yang berpendidikan S-2 sebanyak 8 Orang atau 13,11 %. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Tabel 2.2

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN KOMPOSISI KEPANGKATAN TAHUN 2022

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	Golongan IV (Pembina)	6 Orang	9,83 %
2.	Golongan III (Penata)	29 Orang	47,54 %
3.	Golongan II (Pengatur)	2 Orang	3,27 %
4.	Golongan I	-	0 %
5.	Tenaga Honorer	24 Orang	39,34%
Jumlah		61 Orang	100 %

Sumber :Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kubu Raya, 2022.

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Penata sebanyak 29 orang atau 47,54 %.

Tabel 2.3
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN KOMPOSISI JABATAN TAHUN 2022

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH			
			Orang		%
1	2		3		4
1.	Eselon II b		1 Orang		1,63 %
2.	Eselon III a		1 Orang		1,63 %
3.	Eselon III b		4 Orang		6,56 %
4.	Eselon IV a		3 Orang		4,91 %
5.	Eselon IV b		1 Orang		1,63 %
6.	Fungsional		16 Orang		26,23%
7.	Staf		11 Orang		18,03 %
8.	Tenaga Honorer		24 Orang		39,34%
Jumlah			61 Orang		100 %

Sumber :Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kubu Raya, 2022.

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselon Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon II.b sampai dengan Eselon IV.a sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 11 orang atau 18,03% dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

2.3 Kinerja Pelayanan DKUKMPP

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab di bidang pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditunjukkan melalui pembinaan intensif terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tetap berupaya memberikan pelayanan prima kepada klien khususnya Gerakan Koperasi dan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah. Sistem pelayanan menerapkan SOP (Standard Operational Procedure).

Pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilakukan setiap hari kerja di Kantor ataupun di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Implementasi pelayanan publik dimaksud sebagai mana tertuang dalam alur pelayanan masing-masing Sekretariat, Bidang dan UPTD.

2.3.2. Kinerja Pelayanan DKUKMPP

Secara umum kualitas pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan secara terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut adalah :

1. Meningkatnya kepedulian berbagai stakeholder yang terkait pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain: Masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi (Dekopinwil/Dekopinda, Forda UKM, Kadin), Perguruan Tinggi, dan BUMN/BUMS.
2. Meningkatnya anggaran pembangunan untuk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui Dana APBD dan dukungan pembiayaan melalui dana APBN Kementrian Koperasi dan UKM RI, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendirikan Koperasi dan mengembangkan usaha di berbagai sektor.
4. Meningkatnya penerapan pola kemitraan antar Perusahaan dan masyarakat terutama dalam hal pengembangan usaha di sektor pertanian (perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, tanaman pangan).

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan meliputi kapasitas Sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional dan Bimtek.
2. Tersedianya hasil-hasil kajian berupa Database Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang pemberdayaan Koperasi melalui Workshop, Temu Usaha, Pelatihan dll.
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Kementrian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Evaluasi capaian hasil Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Koperasi Aktip	-	55 %	-	51%	51 %	51 %	52 %	52%	55 %	51	51	51	52	52	55	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Persentase Usaha Kecil dan Menengah Kecil	-	54 %	-	50%	50 %	50 %	52 %	52 %	54 %	50	50	50	52	52	55	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Jumlah peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional tentang perdagangan	-	3 Perbup	-	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	2	3	66 %	66 %	66 %	66 %	66 %	100 %

4	Jumlah pusat/sentra-sentra Industri potensial dan unit usaha IKM produktif.	-	2 Sentra	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	50 %	50 %	50 %	50 %	50%	100 %
5	Jumlah Pelayanan Tera/Tera ulang terhadap para pedagang/ Pelaku pasar.	-	250 Perdagangan	-	0	0	0	200	329	342	0	0	0	200	329	342	0	0	0	100 %	100 %	100%
6	Predikat (Nilai) LAKIP DK-UMPP	-	A	A				CC	BB	BB				CC	BB	BB		100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019

NO	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian pada Tahun Ke						Rata-rata	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	19
1	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000	10,000,000	12,750,000	23,980,000	10,000,000	176,665,300	9.900.000	9,921,000	12,750,000	16,750,000	6,100,000	160.335.000	50	99.21	100	63	61	90.76	0%	0%
2	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	0	10,000,000	12,750,000	0	0	0	0	9,921,000	12,750,000	0	0	0	0	99.21	100	0	0	0	0%	0%
3	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	10.000.000	0	0	10,000,000	0	15,021,000	9.900.000	0	0	8,650,000		14.434.600	99	0	0	37	0	96	0%	0%
4	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	0	0	0	13,980,000	10,000,000	161,644,300	0	0	0	8,100,000	6,100,000	145.900.400	0	0	0	35	61	90.26	0%	0%
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	391.116.904	477,458,097	494,757,400	747,997,400	589,338,700	863,855,975	340.721.608	418,514,088	450,664,912	695,891,752	589,338,700	838.617.761	87	87.65	91	68	100	97.08	0%	0%
6	Penyediaan jasa surat menyurat	54.900.000	0	0	0	0	0	53.400.000	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.600.000	49,400,000	47,139,700	131,035,000	116,400,000	152,800,000	11.020.308	45,894,138	43,934,312	125,467,610	113,879,785	141.154.586	40	92.90	93	96	97.83	92.38	0%	0%
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.233.500	41,480,000	44,190,000	101,802,000	134,000,000	151,417,750	35.233.500	41,480,000	44,188,400	101,777,700	134,000,000	151.417.750	100	100	100	14	100	100	0%	0%
9	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	25,284,200	20,000,000	45,100,000	20,000,000	38,650,225	25.000.000	24,062,250	20,000,000	40,911,600	20,000,000	38.650.225	100	95.17	100	91	100	100	0%	0%
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	20,250,000	21,000,000	25,000,000	10,000,000	20,000,000	15.000.000	20,250,000	21,000,000	25,000,000	10,000,000	20.000.000	100	100	100	100	100	100	0%	0%

11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	5,938,000	20.000.000	1,980,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	5.910.000	100	99	100	100	100	99.53	0%	0%
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	2,760,000	4,100,000	2,760,000	1,020,000	1,080,000	2.160.000	1,800,000	3,530,000	2,460,000	990,000	1.035.000	43	65.22	86	89	97.05	95.83	0%	0%
13	Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000	11,000,000	33,000,000	55,000,000	55,000,000	76,500,000	8.360.000	10,750,000	33,000,000	54,990,000	55,000,000	76.500.000	76	97.73	100	100	100	100	0%	0%
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	139.663.900	184,794,897	138,974,200	122,964,900	125,050,000	197,300,000	131.570.800	144,555,500	106,911,400	110,037,842	114,221,843	196.677.350	94	78.22	77	89	91.34	99.68	0%	0%
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	22.512.824	30,514,000	68,663,500	67,628,200	46,468,700	75,000,000	13.041.000	22,070,000	65,151,000	51,022,500	40,100,000	74.700.000	58	72.33	95	75	86.3	99.6	0%	0%
16	Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM	45.206.680	40,215,000	41,690,000	69,367,300	0	42,500,000	38.938.000	37,836,000	37,596,000	67,827,300	0	38.023.950	86	94.08	90	93	0	89	0%	0%
17	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000	3,500,000	3,000,000	18,500,000	15,000,000	13,000,000	0	3,078,200	2,363,800	8,317,200	6,835,500	6.179.400	0	87.95	79	45	45.57	47.53	0%	0%
18	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.000.000	64,760,000	70,000,000	103,840,000	83,400,000	89,670,000	4.998.000	64,758,000	69,990,000	103,080,000	83,400,000	88.369.500	100	100	100	10	100	98.55	0%	0%
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	356.925.000	561,303,240	546,084,700	469,765,150	305,625,500	774,809,000	342.666.400	547,069,957	540,423,500	0	298,672,900	686.401.240	96	97.46	99	80	97.72	88.59	0%	0%
20	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	26.125.000	250,000,000	41,729,000	0	0	0	25.285.000	245,275,000	41,729,000	0	0	0	96	98.11	100	0	0	0	0%	0%

21	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	49,828,240	41,400,000	90,065,150	30,000,000	0	0	49,825,000	41,400,000	86,636,000	29,900,000	0	-	99.99	100	11	99.67	0	0%	0%
22	Pengadaan peralatan gedung kantor	167.800.000	100,000,000	200,820,000	0	0	97,934,000	161.429.250	95,575,000	200,685,000	0	0	97.467.501	96	95.58	100	0	0	100	0%	0%
23	Pengadaan mebeleur	14.000.000	81,225,000	10,045,000	0	0	45,650,000	13.510.000	80,725,000	9,400,000	0	0	37.050.000	97	99.38	94	0	0	81	0%	0%
24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	88,426,700	0	0	413,225,000	0	0	87,874,000	0	0	410.604.000	0	0	99	0	0	99	0%	0%
25	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000	56,000,000	133,664,000	186,700,000	113,000,000	135,000,000	38.442.150	53,919,957	129,740,500	177,272,000	109,712,400	74.727.062	85	96.29	97	95	97.1	55.35	0%	0%
26	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	6.000.000	14,250,000	15,000,000	45,000,000	5,125,500	15,000,000	6.000.000	14,250,000	14,845,000	44,690,000	4,964,000	12.785.800	100	100	99	99	97	85	0%	0%
27	Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya	3.000.000	10,000,000	15,000,000	38,000,000	25,000,000	33,000,000	3.000.000	7,500,000	14,750,000	37,962,500	23,694,000	32.500.000	100	75	98	100	94.53	98.48	0%	0%
28	Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	95.000.000	0	0	110,000,000	132,500,000	35,000,000	95.000.000	0	0	105,900,000	130,402,500	21.266.877	100	0	0	96	98	61	0%	0%
29	Program peningkatan disiplin aparatur	13.750.000	71,490,000	63,610,000	0	0	32,106,000	13.750.000	65,550,000	63,610,000	0	0	32.106.000	100	91.69	100	0	0	100	0%	0%
30	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.750.000	65,550,000	63,610,000	0	0	32,106,000	13.750.000	65,550,000	63,610,000	0	0	32.106.000	100	100	100	0	0	100	0%	0%

41	Penyusunan Rencana Kerja, RK4, DPA dan DPPA	0	0	0	24,570,000	10,000,000	28,108,800	-	0	0	20,075,000	9,698,000	23,917,000	-	0	0	69	96.98	85.09	0%	0%
42	Penyusunan LPPD	7.500.000	15,000,000	13,440,000	10,000,000	10,000,000	15,750,000	7.492.000	14,470,850	13,440,000	9,115,000	9,693,950	13.389.000	100	96.47	100	35	96.94	85.01	0%	0%
43	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	61.776.260	163,285,000	113,302,000	239,000,000	0	146,627,000	56.934.100	123,939,950	106,288,500	238,600,000	0	141.331.400	92	75.90	94	100	0	96	0%	0%
44	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMKM	0	0	0	239,000,000	0	100,000,000	0	0	0	238,600,000	0	99.192.100	0	0	0	100	0	99	0%	0%
45	Workshop Penyempurnaan Kemasan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0	98,125,000	49,988,000	0	0	46,627,000	0	78,607,400	49,708,500	0	0	42.139.300	0	80.11	99	0	0	90	0%	0%
46	fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	61.006.260	65,160,000		0	0	0	56.164.100	45,332,550	0	0	0	0	92	75.90	0	0	0	0	0%	0%
47	Sosialisasi Perda badan layanan umum kredit mikro bagi KUMKM	770.000			0	0	0	770.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0%	0%
48	Pelatihan Keterampilan UMKM	0	-	63,314,000	0	0	0	0	0	56,580,000	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0%	0%
49	Pengembangan Marketing Bisnis Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
50	Pelatihan Informasi dan Teknologi (IT) bagi Aparatur untuk Design Produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

51	Penataan Galeri UMKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
52	Business Gathering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
53	Persiapan Launching BatikKhas Kubu Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
54	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	906.808.884	1.088.019.200	341,137,200	169,868,000	264,800,000	444,621,700	802.115.088	875.699.200	169,167,200	137,611,000	248,360,120	432.084.100	88	80	50	79	100	97	0%	0%
55	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	179.738.584	289,000,000	269,310,000	100,544,000	103,800,000	294,908,500	140.696.196	238,730,600	98,460,000	71,044,000	101,445,620	287.334.100	78	82.61	37	69	93.79	97.43	0%	0%
56	Pengembangan, pengendalian, pengawasan koperasi simpan pinjam dan LKM	36.025.648	34,944,900	8,000,000	0	0	0	32.864.000	28,417,500	8,000,000	0	0	-	91	81.32	100	0	0	0	0%	0%
57	Bimtek Pengembangan Kerajinan Daerah	0	74,543,000	27,974,000	0	0	0	0	63,487,000	26,854,000	0	0	-	-	85.17	96	0	0	0	0%	0%
58	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah	38.584.476	37,086,000	10,063,200	0	20,000,000	20,000,000	31.084.500	20,128,500	10,063,200	0	20,000,000	19.774.250	81	54.28	100	0	100	98.87	0%	0%
59	Persiapan pembentukan UPTD-BLUD Dana Bergulir	0	173.174.500	0	0	0	0	0	99.315.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
60	Peningkatan sarana dan prasarana kios PKL/UMKM	0	260.484.600	0	0	0	0	0	241.949.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

61	Penyusunan profil produk UMKM di Kabupaten Kubu Raya	0	55.220.000	0	0	0	0	0	42.939.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
62	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	150.195.948	0	0	0	0	0	124.140.100	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0%	0%
63	Bimtek strategi pemasaran produk bagi UMKM	46.525.100	0	0	0	0	0	46.503.100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0%	0%
64	Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	51.872.288	0	0	0	0	0	51.830.392	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0%	0%
65	Kajian pengelola herbal bawang dayak bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	29.955.600	0	0	0	0	0	23.625.000	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0%	0%
66	fasilitasi pengembangan kerajinan daerah	53.493.440	0	0	0	0	0	53.240.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0%	0%
67	kajian peningkatan ekonomi mikro dengan pengembangan kawasan industri pengolahan Kabupaten Kubu Raya	200.375.000	0	0	0	0	0	197.720.000	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0%	0%
68	Pelatihan penyusunan RAT	120.042.800	0	0	0	0	0	100.411.800	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0%	0%
69	Bimbingan Teknis Wirausaha Potensial UKM	0	0	25,790,000	0	0	0	0	0	25,790,000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0%	0%
70	Bimtek Manajemen Usaha bagi UMKM Kab.Kubu Raya	0	50,016,200	0	69,314,000	84,000,000	56,803,000	0	37,122,900	0	66,567,000	74,139,500	53.136.850	0	74.22	0	95	88.26	93.55	0%	0%

71	Bimtek Kemitraan Koperasi dan UMKM	0	58,700,000	0	0	33,000,000	37,910,200	0	50,228,000	0	0	28,775,000	36.838.900	0	85.57	0	0	87.2	97.17	0%	0%
72	Peningkatan sarana dan prasarana promosi	0	54,850,000	0	0	0	-	0	53,380,700	0	0	0	-	0	97.32	0	0	0	0	0%	0%
73	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	0	0	0	0	24,000,000	35,000,000	0				24,000,000	35.000.000	0	0	0	0	100	100	0%	0%
74	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	487.529.502	713,654,600	143,363,900	175,287,500	125,850,000	65,872,000	411.139.550	557,681,800	136,282,400	161,981,100	125,850,000	58.102.750	84	78.14	95	84	100	88.21	0%	0%
75	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan/permodalan	50.420.700	34,645,000	28,810,900	32,451,200	30,000,000	35,000,000	31.783.000	19,497,000	28,810,900	28,667,800	25,265,000	34.946.050	63	56.28	100	81	84.22	99.85	0%	0%
76	Workshop Penyusunan Proposal Pinjaman Koprasi dan UMKM	0	41,782,500	32,237,800	30,777,300	0	0	0	35,336,700	32,237,800	30,777,300	0	0	-	84.57	100	92	0	0	0%	0%
77	Temu usaha pengusaha dengan UMKM	48.672.160	53,000,000	41,107,500	36,957,000	0	0	46.471.200	40,709,500	35,237,000	32,251,000	0	0	95	76.81	86	81	0	0	0%	0%
78	Workshop penyusunan laporan keuangan simpan pinjam koperasi	64.894.692	47,950,000	41,207,700	0	0	0	46.894.500	43,777,600	39,996,700	0	0	0	72	91.30	97	0	0	0	0%	0%
79	Workshop kerjasama antar lembaga untuk pembiayaan K-UMKM	77.054.100	47,398,000	0	0	0	0	53.676.000	34,157,000	0	0	0	0	69	72.06	0	0	0	0	0%	0%
80	Penataan pembangunan halaman pasar/kios kecamatan Rasau Jaya	200.900.000	-	0	0	0	0	199.452.000	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0%	0%

91	Pendampingan Penyusunan RAT Koperasi	0	173,986,100	29,060,000	0	0	0	0	146,444,400	29,060,000	0	0	C	0	84.17	100	0	0	0	0%	0%
92	Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi	0	0	1,270,000	0	0	0	0	0	1,270,000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0%	0%
93	Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM	0	50,385,700	0	48,822,500	62,549,599	58,633,000	0	37,389,400	0	45,002,500	55,180,150	53.150.900	0	74.21	0	86	88.22	90.65	0%	0%
94	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	46.399.456	46,926,800	0	0	0	35,950,000	38.686.000	39,161,400	0	0	0	27.376.200	83	83.45	0	0	0	76	0%	0%
95	Pengawasan Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
96	Penyusunan Dat Base Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
97	pelatihan penataan organisasi koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
98	Sosialisasi peraturan perundang-undangan koperasi	12.245.000	0	0	0	0	0	10.305.000	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0%	0%
99	Pengembangan wawasan aparatur/SDM terhadap Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
100	Kajian implementasi Koperasi terhadap ekonomi masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

101	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	19.192.000	10,000,000	35,698,000	42,790,000	52,000,000	51,375,000	8.615.800	35,698,000	35,698,000	24,994,322	39,539,916	49.001.000	44	0	100	39	76.03	95.38	0%	0%
102	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	9.192.000	35,698,000	35,698,000	42,790,000	52,000,000	51,375,000	8.615.800	35,698,000	35,698,000	24,994,322	39,539,916	49.001.000	93	0	100	58	76.03	95.38	0%	0%
103	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	10.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
104	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	33,455,000	33,455,000	15,000,000	6,000,000	20,800,000	0	33,355,000	33,355,000	14,310,000	5,884,000	20.680.000	0	0	100	95	98.06	99.42	0%	0%
105	Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	0	33,455,000	33,455,000	15,000,000	6,000,000	20,800,000	0	33,355,000	33,355,000	14,310,000	5,884,000	20.680.000	0	0	100	95	98	99	0%	0%
106	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	0	0	0	27,000,000	24,000,000	64,544,900	0	0	0	24,764,000	23,430,000	61.027.900	0	0	0	58	97.62	94.55	0%	0%
107	Penyusunan Database E-Formasi	0	0	0	5,000,000	5,500,000	0	0	0	0	4,850,000	5,500,000	0	0	0	0	59	100	0	0%	0%
108	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	0	0	0	7,000,000	5,500,000	0	0	0	0	6,640,000	5,500,000	0	0	0	0	72	100	0	0%	0%
109	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0	0	0	7,000,000	7,000,000	6,969,900	0	0	0	6,184,000	6,430,000	6.824.900	0	0	0	50	91.85	97.92	0%	0%
110	Penyusunan Standar Pelayanan	0	0	0	8,000,000	6,000,000	0	0	0	0	7,090,000	6,000,000	0	0	0	0	55	100	0	0%	0%

111	Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	0	0	0	0	0	57,575,000	0	0	0	0	0	54.203.000	0				0	94.14	0%	0%
112	Program Pengembangan Kelembagaan PKL	152.972.472	0	0	0	0	0	151.577.000	0	0	0	0	0	99				0	0	0%	0%
113	Perbaikan sarana pasar tradisional	152.972.472	0	0	0	0	0	151.577.000	0	0	0	0	0	99				0	0	0%	0%
114	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	0	0	0	80,436,000	61,489,800	0	0	0	0	68,809,500	58.311.650	0	0	0	0	86	94.83	0	0%	0%
115	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	0	0	0	6,951,000	0	0	0	0	0	5,201,000	0	0	0	0	0	75	0	0	0%	0%
116	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	0	0	0	48,338,000	44,057,500	0	0	0	0	39,083,500	42,616,350	0	0	0	0	81	96.72	0	0%	0%
117	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
118	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	0	0	0	25,147,000	17,432,300	0	0	0	0	24,525,000	15,695,300	0	0	0	0	98	90.03	0	0%	0%
119	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	104.015.960	0	0	0	0	0	87.377.600	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0%	0%
120	fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	41.735.360	0	0	0	0	0	37.177.600	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0%	0%

121	fasilitasi sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (SPP-IRT)	62.280.600	0	0	0	0	0	50.200.000	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0%	0%
122	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	40.770.000	0	0	0	0	0	32.268.000	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0%	0%
123	Penyusunan Updating Data Base Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
124	Pelatihan pembinaan manajemen IKM	40.770.000	0	0	0	0	0	32.268.000	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0%	0%
125	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	363.383.794	299,899,000	144,928,700	255,095,650	298,343,000	475,171,900	331.605.450	280,471,200	121,343,400	248,080,155	273,544,061	464.043.577	91	94	84	97	91.69	97.66	0%	0%
126	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	0	34,899,000	10,977,500	44,526,400	86,365,500	164,158,000	0	20,488,400	10,974,200	40,495,905	82,631,431	162.502.377	0	59	100	91	95.67	98.99	0%	0%
127	Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang Penting dan Barang Umum lainnya	23.247.500	15,000,000	5,500,700	49,400,000	140,197,000	164.153.900	21.726.100	12,647,100	5,500,700	48,320,000	131,016,200	162.567.600	93	84	100	98	93.45	99.03	0%	0%
128	Pasar Murah	242.179.650	250,000,000	128,450,500	154,289,250	0	72,590,000	230.436.850	247,335,700	104,868,500	152,384,250	0	71.741.100	95	99	82	99	0	99	0%	0%
129	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	0	0	0	0	36,901,000	0	0	0	0	0	34,756,930	0	0	0	0	0	94.18	0	0%	0%
130	Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	0	0	0	6,880,000	8,983,500	11,576,000	0	0	0	6,880,000	8,733,500	11.573.000	0	0	0	100	97.21	99.97	0%	0%

131	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	25,896,000	0	0	0	0	0	16,406,000	0	0	0	0	0	63.35	0	0%	0%
132	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	97.956.644	0	0	0	0	62,694,000	79.442.500	0	0	0	0	55.659.500	81	0	0		0	88.78		
133	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	141.761.940	2,546,814,000	102,459,100	0	0	0	39.521.900	266,043,600	101,559,500	0	0	0	28	10	99	0	0	0	0%	0%
134	Pengawasan Peredaran Bahan Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0%	0%
135	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	141.761.940	55,000,000	21,866,300	0	0	0	39.521.900	47,478,000	20,966,700	0	0	0	28	86	96	0	0	0	0%	0%
136	Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen Kabupaten Kubu Raya		60,000,000		0	0	0	0	28,743,400	0	0	0	0	0	48		0	0	0	0%	0%
137	fasilitasi penanganan pengaduan sengketa konsumen oleh BPSK Kabupaten Kubu Raya	0	0	61,460,000	0	0	0	0	0	61,460,000	0	0	0	0		100	0	0	0	0%	0%
138	sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Konsumen	0	25,000,000	19,132,800	0	0	0	0	24,436,200	19,132,800	0	0	0	0	98	100	0	0	0	0%	0%
139	pendataan pedagang dan potensi pasar tradisional	0	45,645,000		0	0	0	0	44,665,000	0	0	0	0	0	98		0	0	0	0%	0%
140	pembangunan pasar	0	2,361,169,000		0	0	0	0	120,721,000	0	0	0	0	0	5		0	0	0	0%	0%

141	Program pembinaan pedagang Kakilima dan Asongan	0	0	1,676,410,600	2,957,157,000	5,985,138,175	2,556,082,875	0	0	94,599,000	2,861,994,800	5,804,850,923	2.459.943.961	0	0	6	100	96.98	96	0	0
142	Rapat koordinasi Revitalisasi Pasar Rakyat/Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
143	Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Pasar/Pedagang	0	0	1,651,998,100	2,957,157,000	5,985,138,175	2,556,082,875	0	0	70,186,500	2,861,994,800	5,804,850,923	2.459.943.961	0	0	4	3	96.98	96.24	0%	0%
144	workshoop dan pembinaan pengelolaan pasar	0	0	24,412,500	0	0	0	0		24,412,500		0	0	0		100		0			
145	Penyelenggaraan Metrologi Legal	1.136.207.512	2.153.413.730	97,643,580	389,430,000	278,853,500	257,872,600	1.016.394.600	0	0	316,086,072	262,983,500	242.979.380	89	0	0	81	94.3	94	0%	0%
146	Verifikasi Alat-alat Standar	0	0	24,081,580	25,500,000	44,500,000	75,217,000	0	0	0	23,713,000	40,621,500	65.109.700	0	0	0	93	91.28	86.56	0%	0%
147	Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi Kemetrologian	0	27.861.500	0	30,740,000	0	0	0	0	0	25,366,000	0	0	0	0	0	83	0	0	0%	0%
148	Diklat Aparatur Metrologi	95.705.100	40.330.000	23,683,000	33,190,000	20,250,000	21,550,000	42.135.400	0	0	18,483,000	13,921,000	19.226.880	44	0	0	56	68.74	89.22	0%	0%
149	Penyediaan Peralatan Standar dan Perlengkapan Pelayanan Tera dan Tera Ulang	0	0	0	84,000,000	46,893,500	0	0	0	0	81,960,000	46,206,000	0	0	0	0	98	98.53	0	0%	0%
150	Pembuatan Sistem Manajemen Mutu UPTD Metrologi Legal	0	0	0	42,000,000	0	0	0	0	0	36,950,572	0	0	0	0	0	88	0	0	0%	0%

151	Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	0	0	0	70,000,000	117,210,000	107,505,600	0	0	0	48,731,000	112,235,000	105.042.800	0	0	0	70	95.75	97.71	0%	0%
152	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	9,820,000	0	0	0	0	0	98	0	0	0%	0%
153	Pengelolaan Laboratorium	0	0	0	94,000,000	50,000,000	53,600,000	0	0	0	71,062,500	50,000,000	53.600.000	0	0	0	76	100	100	0%	0%
154	Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana UPTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	pengawasan dan penyuluhan kemetrologian	0	0	15.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	pendampingan dan fasilitasi tera dan tera ulang UTTP	39.466.048	39.987.000	23.506.000	0	0	0	33.677.500	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
157	Pembangunan gedung UPT Metrologi Legal	0	1.146.622.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	penyediaan kendaraan operasional Metrologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	pengadaan peralatan dan perlengkapan kemetrologian	898.200.000	450.000.000	0	0	0	0	855.330.000	450.000.000	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0
160	penyusunan raperda retribusi tera dan tera ulang UTTP	59.672.600	425.613.000	0	0	0	0	42.610.200	361.790.000	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0

161	Pelaksanaan sensus dan penyusunan database metrologi	43.163.764	23.000.000	0	0	0	0	42.641.500	18.551.000	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
162	Program penataan struktur industri	69.789.660	28.999,950	24,372,900	131,419,700	0	0	58.684.300	27,606,950	24,232,900	127,120,200	0	0	84	95	99	97	0	0	0	0
163	Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida)	0	0	7,840,000	131,419,700	0	0	0	0	7,700,000	127,120,200	0	0	0	0	98	97	0	0	0	0
164	penyusunan database industri	22.609.360	20,000,000	0	0	0	0	21.659.000	19,177,500	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	0	0
165	partisipasi rakor penyusunan program perindustrian	47.180.300	0	0	0	0	0	37.025.300	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0
166	monitoring dan evaluasi industri	0	8,999,950	16,532,900	0	0	0	0	8,429,450	16,532,900	0	0	0	0	94	100		0	0	0	0
167	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	479.925.568	163.683.700	399,147,325	244,040,000	362,625,000	427,924,500	459.518.000	161.863.700	399,087,325	232,062,000	342,080,800	398.647.000	96	99	99	95	94.33	93.16	0%	0%
168	Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar	0	125.683.700	111,187,200	127,640,000	155,489,000	123,624,500	0	125.683.700	111,187,200	117,738,000	140,621,500	121.992.900	-	100	100	92	90.43	98.68	0%	0%
169	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	194.693.568	0	274,253,125	116,400,000	207,136,000	216,850,000	183.538.000	0	274,253,125	114,324,000	201,459,300	197.255.700	96	0	100	98	97.26	90.96	0%	0%
170	fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan perindustrian	0	0	13,707,000	0	0	0	0	0	13,647,000	0	0	0	0		99		0	0		

171	Penyusunan Data Base Industri Kecil Menengah	0	0	0	0	0	45,950,000	0	0	0	0	0	42.250.000	0	0	0	0	0	91.95	0%	0%
172	Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) RPIK	0	0	0	0	0	41,500,000	0	0	0	0	0	37.148.400	0	0	0	0	0	89.51	0%	0%
173	Promosi Batik Khas Kubu Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
174	Bahan Percontohan Pameran Untuk Galeri UMKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
175	pelatihan pengembangan produk dan teknologi karet alam	85.232.000	0	0	0	0	0	77.980.000	0	0	0	0	0	96	0	0		0	0	0%	0%
176	kajian strategis pengembangan kawasan industri Kabupaten Kubu Raya	200.000.000	0	0	0	0	0	198.000.000	0	0	0	0	0	99	0	0		0	0	0%	0%
177	bimbingan teknis pengembangan design kerajinan	0	38.000.000	0	0	0	0	0	36.180.000	0	0	0	0	-	95	0		0	0	0%	0%
178	Fasilitasi Operasional Galeri Dekranasda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0%	0%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKUKMPP

Tantangan yang dihadapi dalam pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kubu Raya antara lain

- a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau penyuluh koperasi tentang manajemen usaha koperasi dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas
- b. Terbatasnya infrastruktur sehingga berdampak pada kesulitan dalam mengembangkan usaha.
- c. Terbatasnya pembiayaan untuk pemberdayaan Koperasi untuk beberapa kecamatan dan pembiayaan untuk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Terbatasnya sarana prasarana perdagangan.
- e. Terbatasnya pembiayaan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan harga sembako, barang penting, dan barang umum lainnya.
- f. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal sehingga rendahnya akses terhadap pemasaran baik pasar local dan luar daerah yang disebabkan kualitas produk yang kurang berdaya saing sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya melakukan inovasi berupa pemanfaatan teknologi canggih berbasis website.
- g. Masih rendahnya daya saing produk UMKM seperti rendahnya kualitas produk dan kemasan yang kurang menarik sehingga tantangan untuk dinas dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha dengan mengikuti pelatihan keterampilan usaha melalui pendidikan dan pelatihan.
- h. Masih kurang lancarnya peredaran Bapokting seperti BBM (Solar dan LPG) dikarenakan banyak factor seperti terbatasnya kuota BBM (Solar dan LPG) serta database kebutuhan BBM Solar dan LPG yang belum valid.

- i. Maraknya Pedagang Kaki Lima yg berada di jalur illegal sehingga ini tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pengawasan pasar serta peluang dalam mengajukan modal dan penambahan jumlah lokasi pasar yang dapat menampung pedagang secara resmi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memfasilitasi penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun isu masalah pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sebagian Koperasi tidak melaksanakan RAT	Terbatasnya pengetahuan tentang Manajemen Usaha Koperasi, lemahnya kelembagaan koperasi,rendahnya partisipasi anggota koperasi	Pengurus kurang paham hakikat Koperasi, rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi,masih rendahnya akses koperasi terhadap teknologi dan terbatasnya jejaring usaha koperasi
2	Rendahnya kualitas produk dan kemasan yang kurang menarik	Jarang mengikuti pelatihan keterampilan usaha dan terbatasnya modal untuk membuat kemasan yang baik	Kurangnya informasi terkait Program Kegiatan UMKM serta sulit mengakses permodalan karena tidak Bankable
3	Terbatasnya jumlah SPBU dan Pangkalan LPG 3 kilogram bersubsidi	Terbatasnya kuota BBM Solar dan LPG	Database kebutuhan BBM dan LPG belum valid
4	Belum mampu menyewa kios / lapak dan belum menyadari ketertiban lalu lintas	Terbatasnya modal usaha dan masih berorientasi berjualan dipinggir jalan raya	Sarana pasar yang masih terbatas

5	Tingkat pengetahuan pengelolaan potensi lokal yang terbatas	Belum membentuk kelompok usaha bersama	Lebih suka berusaha sendiri
---	---	--	-----------------------------

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius**”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance).
- 2) Meningkatkan infrastuktur serta pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup.
- 3) Meningkatkan penguatan ekonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan bersandarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan misi Kabupaten Kubu Raya terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- 7) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 9) Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
- 10) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- 11) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 12) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Kecil Menengah
- 13) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 14) Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Kecil.
- 15) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 16) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
- 17) Program Penyelenggaraan Metrologi Legal
- 18) Program Penataan Struktur Industri
- 19) Program Pengembangan Sentra -Sentra Industri Potensial

3.3. Telaahan Renstra K/L da Renstra

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi

perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2) Meningkatkan kepuasan pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan pengelolaan tata ruang wilayah.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- 5) Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
- 6) Meningkatkan layanan sanitasi.
- 7) Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 8) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- 9) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
- 10) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan.
- 11) Meningkatkan investasi penanaman modal daerah.
- 12) Meningkatkan investasi penanaman modal daerah.
- 13) Meningkatkan daya saing sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan Pariwisata.
- 14) Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- 15) Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
- 16) Meningkatkan desa berstatus swasembada.
- 17) Meningkatkan kesejahteraan petani.
- 18) Meningkatkan kualitas kawasan perdesaan.
- 19) Meningkatkan aktivitas religius organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- 20) Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan bermasyarakat.
- 21) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penurunan kesenjangan gender.
- 22) Meningkatkan responsivitas gender.
- 23) Meningkatkan kemandirian perempuan kepala keluarga, korban KDRT dan trafficking, serta tenaga kerja wanita binaan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun dengan program dan kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu :

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia perencana Sosial, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah :

1. Belum tersedianya peraturan pelaksanaan penataan ruang yang telah disahkan;
2. Kapasitas SDM perencana yang belum memadai;
3. Rendahnya kepedulian dan komitmen stakeholders terkait penataan ruang;
4. Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya

mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kedepan serta mengkoordinasikan permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan stakeholders terkait.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

1) Isu-Isu Internal

Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengacu kepada Isu Strategis Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam tataran nasional adalah kepada Peningkatan Daya Saing UMKM :

1. Bidang Perkoperasian
 - a. Koperasi, belum menjalin kemitraan yang optimal dengan Pengusaha Besar atau Stakeholder
 - b. Pola Kemitraan yang diterapkan hanya terbatas pada Inti Plasma, Perdagangan Umum, dan Sub Kontrak namun Pola Waralaba dan Distribusi & Keagenan belum dilaksanakan secara intensif.
 - c. Kemitraan yang terjalin kurang didukung dengan kesepakatan yang kuat secara tertulis dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) atau Kontrak / Perjanjian Kerjasama.
 - d. Usaha yang dikelola belum memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sehingga masih terdapat lahan tidur, limbah / bahan bekas yang terabaikan.
 - e. Usaha yang dikembangkan masih banyak dalam skala mikro dan belum dikembangkan secara terfokus dalam bentuk sentra.

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain :

- Persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan
- Terjadinya monopoli
- Munculnya distorsi dalam pasar
- Usaha menjadi kurang efisien

- f. Belum semua SDM Koperasi mendapat pelatihan perkoperasian, manajemen usaha kecil, akuntansi, kewirausahaan dll.
 - g. Pelatihan SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan belum menerapkan metode partisipatif
 - h. Sarana pelatihan masih terbatas
 - i. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan RAT
 - j. Manajemen organisasi masih sederhana
 - k. Koperasi belum memiliki sekretariat yang tetap
 Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain :
 - Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang professional
 - Tidak tertib dalam menjalankan administrasi
 - l. Kerjasama dengan perbankan atau BUMN/BUMD untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - m. Modal Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terbatas
 - n. Pengurus Koperasi belum mampu membuat proposal yang standar
 - o. Belum ada kemauan pihak perbankan untuk membuka cabang di pelosok desa
 Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain :
 - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami kesulitan
 - Perkembangan usaha berjalan lamban
 - Produktivitas usaha tidak meningkat
2. Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- a. Penyebarluasan informasi pasar sangat terbatas
 - b. Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam pemasaran produk masyarakat masih lemah
 - c. Belum tersedianya Pusat Oleh Oleh di kawasan strategis
 - d. Pelaku usaha terikat dengan pedagang tertentu
 - e. Pengetahuan masyarakat tentang system pemasaran masih rendah
 - f. Keuntungan Pedagang Perantara terlalu besar

- g. Penanganan pasca panen masih rendah
- h. Kemasan produk yang dijual masih sederhana

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain :

- Nilai jual komoditi usaha masyarakat rendah
- Tingkat pendapatan rendah
- Rantai pemasaran terhambat
- Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah

3. Bidang Perdagangan

a. Pengembangan Distribusi

Masalah pengembangan distribusi Sarana dan prasarana masih terbatas, sehingga mengakibatkan disparitas harga yang tinggi antar pulau.

b. Perdagangan Antar Pulau

Masalah perdagangan antar pulau Perbedaan geografis pulau-pulau di Indonesia dengan sumber yang berbeda-beda secara alami membawa konsekuensi, tidak semua dapat dipenuhi oleh daerah sendiri.

c. Perlindungan Konsumen

Masalah Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di pasar, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Tata cara Pengawasan Barang dan Jasa beredar di pasar.

d. Masalah Pengelolaan Pasar Tradisional, Desa dan Modern sangat diperlukan didalam Pemerintah Daerah mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana pasar, di upayakan pembangunan Pasar tradisional diberikan kepada masyarakat, sarana dan prasarana yang saat ini masih direncanakan untuk dibangun supaya lebih baik dan layak sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dengan membuatkan Perda distribusi.

4. Bidang Perindustrian

a. Promosi

Masalah di bidang promosi untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri perlu diadakan promosi tingkat nasional sampai ke tingkat internasional.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam usaha IKM belum banyak yang berkualitas handal dan profesional, disamping itu pengusaha IKM pada umumnya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu.

c. Daya Saing Produk

Masalah dibidang daya saing produk kurangnya keterampilan pelaku IKM dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, khususnya bidang Agro Industri, sulitnya pengembangan industri dan sulitnya pengembangan keanekaragaman produk karena terbatasnya modal.

d. Pemahaman tentang HAKI

Masih belum meluasnya wawasan dan pengetahuan HAKI (Hak Paten,Hak Cipta, Merk, dll), sehingga para pelaku IKM belum terobsesi untuk melakukan inovasi teknologi dan system manajemen baru untuk membangun keunggulan kompetisi.

e. Teknologi

Penguasaan teknologi produksi mutu mengenai HAK, sebagian kurang pertemuan industri kecil masih terbatas dan belum maju, termasuk daya saing untuk inovasi teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana.

2) Isu-Isu Eksternal

Isu – isu eksternal turut memicu bertambahnya permasalahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain ;

- a. Dengan berlakunya AFTA (Asian Free Trade Area) dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) maka produk lokal belum mampu bersaing karena harga produk impor lebih murah.
- b. Tingginya harga minyak dunia menjadikan kegiatan bisnis menjadi pemicu High Cost Economy.
- c. Resesi / krisis ekonomi dunia berdampak pada krisisnya perusahaan – perusahaan besar di Asia yang berpengaruh terhadap tingginya komponen-komponen / suku cadang bahan yang di impor Indonesia yang berpengaruh terhadap perusahaan di tanah air yang tergantung dengan peralatan impor tersebut.

Isu internal dan eksternal dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kubu Raya tentunya harus disikapi dan diatasi secara bertahap oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2007, Pemerintah Kabupaten telah melakukan satu tahapan RPJMD dari empat tahapan RPJMD yang direncanakan dalam RPJPD 2009-2029. Pembangunan yang dilakukan masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan dasar. Rentang geografis wilayah yang luas juga mempengaruhi pencapaian target pembangunan di daerah menjadi tidak optimal ditambah dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan yang belum memadai. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Kubu Raya khususnya yang terkait dengan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami peningkatan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,31 sebagai dampak dari perhitungan baru yang digunakan oleh BPS (BPS, 2018) yang menduduki peringkat ke 3 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat; (sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya,2018)
2. Masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 5,26 % atau 29.530 jiwa dari 604.563 penduduk Kabupaten Kubu Raya dan pengangguran.(sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya,2018)
 1. Belum optimalnya sinergisitas dan sinkronisasi antara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang disusun (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pelaksanaannya di tingkat SKPD dan masyarakat yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan daerah. Dengan demikian diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas melalui peningkatan kualitas dokumen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 2. Koordinasi antar lembaga belum optimal, baik koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah, koordinasi dalam fasilitasi dan pencarian sumber pembiayaan pembangunan, dan koordinasi penanganan masalah-masalah

mendesak/strategis seperti penanganan bencana alam dan penanggulangan kemiskinan di daerah.

3. Belum ditetapkannya RTRW Kabupaten Kubu Raya, sehingga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar sub wilayah belum optimal dan perencanaan pembangunan yang dibuat belum sepenuhnya memperhatikan aspek spasial.
4. Belum sepenuhnya selaras dan konsisten antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
5. Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum memberikan kontribusi yang berarti sebagai acuan/dasar penyusunan rencana pembangunan daerah berikutnya.

Kurang tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan valid sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah. Misalnya, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak tersedia tiap tahun. Demikian juga data kemiskinan antara SKPD terkait tidak sama.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran.

Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan sector Koperasi dan UMKM dan meningkatkan sector Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa. Adapun Meningkatkan sector Koperasi dan UMKM dapat melalui peningkatan Koperasi dan UMKM yang sehat serta melalui PDRB Sektor Perdagangan dan PDRB Sektor Perindustrian serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawadengan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui penilaian predikat nilai SAKIP Dinas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tabel 4.1.

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang Sehat	12,95%	12,11%	14%	16%	18%	20%
		Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat	23,89%	41,84%	40%	50%	60%	70%
		Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Persentase IKM yang di Bina	-	-	10%	10%	15%	20%
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	BB	B	B	BB	BB	BB
				71,5	68	68	71,5	71,5	71,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Arah Kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kopearsi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermatabat, Terdepan, Berkualitas dan Relegius					
MISI 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Cara Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Godd and Clean Gorvernance)					
Sasaran di RPJMD-P : S.2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kabijakan
T.1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa	S.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Daerah dan Pelayanan Publik	Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat					
Sasaran di RPJMD-P : S.9. Meningkatkan Sektor UMKM					
T.4	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah	S.13	Meningkatnya sektor Koperasi dan UMKM	Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Koperasi	Memberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tingkat dasar sampai dengan lanjutan secara berkelanjutan
				Membina pelaku usaha mikro dan koperasi dalam Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta memperbaiki manajemen dan pemasaran	
				Membuat perencanaan koperasi dan usaha mikro secara menyeluruh dan terpadu melalui sistem teknologi informasi	
				Meningkatkan kerjasama kemitraan dan partisipasi aktif berbagai stakeholder dalam pengembangan sarana prasarana dan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kreatif	Penguatan Kemitraan untuk menunjang perluasan akses pemodalan, pengembangan usaha dan pemasaran
				Mengoptimalkan peran pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi dan kreatifitas pelaku usaha mikro	Meningkatkan dan mengembangkan jumlah SDM usaha mikro yang berkualitas
				Meningkatkan kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dan pelaku usaha mikro untuk perluasan jangkauan pemasaran	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem manajemen, peningkatan kualitas produk dan jangkauan pemasaran
			Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Mengembangkan jaringan kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan kelancaran distribusi perdagangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengendalian jaringan distribusi serta monitoring ketersediaan barang yang dapat memenuhi permintaan pasar
				Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha
				Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pemakaian Alat Ukur Takar Timbang	Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan pemakaian
			Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kabupaten Raya	Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Produk IKM	Pembinaan melalui Pelatihan, Sosialisasi Workshop dan Bimtek Fasilitasi Pelayanan Standarisasi
				Fasilitasi dan Kerjasama dengan Mitra dan Pihak Swasta	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produk IKM
				Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap IKM	Pembinaan melalui Promosi dan Pemasaran Produk
					Pelaksanaan Monitoring pada IKM
					Pembinaan melalui Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019-2024

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan

0 Program perencanaan pembangunan daerah

- ... 1 Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perubahan
- ... (Renstra) Perubahan SKPD
- 1 2 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4 Penyediaan alat tulis kantor
- 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8 Penyediaan makanan dan minuman
- 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 11 Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM
- 12 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 13 Penyediaan jasa administrasi keuangan

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 4 Pengadaan mebeleur
- 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 7 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
- 8 Pemeliharaan rutin berkala peralatan lainnya
- 9 Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- 4 Program peningkatan disiplin aparatur**
 - 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 1 Penyusunan SOP Pelayanan Terhadap Koperasi dan UMKM
 - 2 Penyusunan Analisa Jabatan
 - 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - 4 Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
- 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - 3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - 4 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA
 - 5 Penyusunan LPPD
- 7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
 - 1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)
 - 2 Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD
- 8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
 - 1 Peliputan Dokumentasi dan Publikasi
- 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah**
 - 1 Penyusunan Database E-Formasi
 - 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
 - 3 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
 - 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 5 Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sasaran Kedua : Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro Kecil

- 1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif**
 - 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMKM
 - 2 Workshop Penyempurnaan Kemasan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 3 Pelatihan Keterampilan UMKM

- 4 Pengembangan Marketing Bisnis Center
- 5 Pelatihan Informasi dan Teknologi (IT) bagi Aparatur untuk Design Produk
- 6 Penataan Galeri UMKM
- 7 Business Gathering
- 8 Persiapan Launching Batik Khas Kubu Raya

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- 1 fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
- 2 memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing
- 3 memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- 4 peningkatan kerjasama dibidang HAKI
- 5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
- 6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- 7 pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
- 8 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
- 9 sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha Mikro Kecil Menengah
- 10 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
- 11 pelatihan SDM Koperasi dan UMKM
- 12 Pengembangan, pengendalian, pengawasan koperasi simpan pinjam dan LKM
- 13 Bimtek Pengembangan Kerajinan Daerah
- 14 Bimtek Kemitraan Koperasi dan UMKM
- 15 kajian pengelola herbal bawang dayak bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
- 16 fasilitasi pengembangan kerajinan daerah
- 17 Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah
- 18 kajian peningkatan ekonomi mikro dengan pengembangan kawasan industri pengolahan kabupaten kuburaya
- 19 pelatihan penyusunan laporan RAT
- 20 Bimtek Manajemen Usaha bagi UMKM Kab Kubu Raya
- 21 Peningkatan sarana dan prasarana promosi
- 22 Bimbingan Teknis Wirausaha Potensial UKM
- 23 Temu usaha pengusaha dengan UMKM
- 24 pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- 1 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
- 2 pengembangan klaster bisnis
- 3 koodrinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi
- 4 koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
- 5 pemantauan pengelolaam penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

- 6 pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
- 7 peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
- 8 penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
- 9 penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
- 10 pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
- 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan/permodalan
- 12 Workshop Penyusunan Proposal Pinjaman Koprasi dan UMKM
- 13 Temu usaha pengusaha dengan UMKM
- 14 persiapan pembentukan UPTD BLUD Dana Bergulir
- 15 peningkatan sarana dan prasarana kios PKL / UMKM
- 16 Workshop kerjasama antar lembaga untuk pembiayaan koperasi dan umkm
- 17 Penataan pembangunan halaman pasar/kos kecamatan rasau jaya
- 18 Perencanaan pembangunan pasar tradisional kecamatan sungai kakap
- 19 Penyusunan profil produk umkm di kabupaten Kubu Raya
- 20 Bimtek manajemen keuangan dan manajemen akuntansi bagi koperasi dan umkm
- 21 Workshop kerjasama antar lembaga untuk pembiayaan K-UMKM
- 22 Pemberdayaan usaha mikro pasca legalisasi SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)
- 23 Sosialisasi pendampingan dan pengawasan KUR
- 24 Sosialisasi IUMK dan KUR bagi UMKM
- 25 pendampingan kerjasama pemasaran produk UMKM

4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- 1 koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
- 2 peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- 3 pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangAn perkoperasian
- 4 sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
- 5 Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- 6 peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
- 7 penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
- 8 rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
- 9 monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 10 Pelatihan manajemen Keuangan Koperasi

- 11 Penguatan pemberdayaan dan relivitalisasi fungsi kelembagaan koperasi
 - 12 pelatihan penataan organisasi koperasi
 - 13 Hari Peringatan Koperasi
 - 14 sosialisasi peraturan perundang-undang koperasi
 - 15 pengembangan wawasan aparatur/ SDM terhadap koperasi
 - 16 Pendampingan Penyusunan RAT Koperasi
 - 17 Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM
 - 18 kajian implementasi koperasi terhadap ekonomi masyarakat
 - 19 Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi
 - 20 Rapat koordinasi pembangunan koperasi dan UMKM
- 14 Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah**
- 1 pelatihan manajemen usaha mikro

Sasaran Ketiga : Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**
 - 1 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
 - 2 Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk
 - 3 pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
 - 4 pengembangan pasar lelang daerah
 - 5 peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 - 6 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 7 Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang Penting dan Barang Umum lainnya
 - 8 pasar murah
 - 9 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
 - 10 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional
- 2 Program pembinaan pedagang Kakilima dan Asongan**
 - 1 pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
 - 2 penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
 - 3 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - 4 fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
 - 5 pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
 - 6 pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan
 - 7 sosialisasi PKL dan Pedagang Tradisional
 - 8 sosialisasi dan pembentukan kelembagaan PKL
 - 9 Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Pasar/Pedagang
 - 10 Workshop dan pembinaan pengelolaan pasar

- 11 Fasilitasi PKL dan Pedagang Tradisional dalam penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi
- 12 fasilitasi relokasi pedagang kaki lima

3 Penyelenggaraan Metrologi Legal

- 1 pengawasan dan penyuluhan kemetrplogian
- 2 Verifikasi Alat-alat Standar
- 3 Pelaksanaan sensus dan Penyusunan Data Base Metrologi
- 4 Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi Kemetrologian
- 5 Diklat Aparatur Metrologi
- 6 pendampingan dan fasilitasi tera dan tera ulang UTTP
- 7 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kemetrologian
- 8 penyusunan raperda retribusi tera dan tera ulang UTTP
- 9 Penyediaan Perlengkapan Pengujian Dan Perlengkapan Keselamatan Kerja
- 10 pembangunan gedung UPT Metrologi Legal
- 11 penyediaan kendaraan operasional metrologi
- 12 Penyediaan Peralatan Standar dan Perlengkapan Pelayanan Tera dan Tera Ulang
- 13 Pembuatan Sistem Manajemen Mutu UPTD Metrologi Legal
- 14 Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP
- 15 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
- 16 Pengelolaan Laboratorium

Sasaran Keempat : Meningkatkan dan Mengembangkan Produk-Produk Kerajinan IKM

1 Program Penataan Struktur Industri

- 1 kebijakan keterkaitan industri Hulu-hilir
- 2 penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
- 3 pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
- 4 Monitoring dan Evaluasi Industri
- 5 penyusunan database industri
- 6 partisipasi rakor dan konsultasi pengembangan daerah
- 7 Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida)
- 8 Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM

2 Program pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

- 1 pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
- 2 penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
- 3 Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar
- 4 Bimtek Pengembangan Design Kerajinan
- 5 pelatihan pengembangan sentra-sentra industri potensial
- 6 Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)
- 7 penyelenggaraan pameran tingkat provinsi dan kabupaten

- 8 kajian strategis pengembangan kawasan industri Kabupaten Kubu Raya
- 9 fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan perindustrian
- 10 Penyusunan Data Base Industri Kecil Menengah
- 11 Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida)

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUBU RAYA
Permendagri No 13

Permendagri No 13																							
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	176.665.300	100%	33.600.000	100%	10.000.000							100%	220.265.300	dkumpp	KKR	
		0101	Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perubahan (Renstra) Perubahan SKPD	Jumlah penyusunan Renstra SKP	Dokumen	0	1 dokumen	15.021.000	0	0		0							1 dokumen	15.021.000	dkumpp	KKR	
		0102	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	Jumlah fasilitas sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	Dokumen	10.000.000	1 dokumen	161.644.300	1 dokumen	33.600.000	1 dokumen	10.000.000							3 dokumen	205.244.300	dkumpp	KKR	
		2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	863.855.975	100%	797.533.900	100%	1.151.700.000							100%	2.813.089.875	dkumpp	KKR	
		0202	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Tahun	116.400.000	1 Tahun	152.800.000	1 Tahun	136.800.000	1 Tahun	151.200.000								3 tahun	440.800.000	dkumpp	KKR
		0203	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun	134.000.000	1 Tahun	151.417.750	1 Tahun	124.935.000	1 Tahun	170.000.000								3 tahun	446.352.750	dkumpp	KKR
		0204	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Tahun	20.000.000	1 Tahun	38.650.225	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	50.000.000								3 tahun	133.650.225	dkumpp	KKR
		0205	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun		1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	30.000.000								3 tahun	75.000.000	dkumpp	KKR
		0206	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	3.000.000	1 paket	5.936.000	1 paket	5.953.900	1 paket	10.000.000								3 tahun	21.891.900	dkumpp	KKR
		0207	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1.020.000	1 Tahun	1.000.000	1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	1.500.000								3 tahun	4.000.000	dkumpp	KKR
		0208	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Tahun	35.000.000	1 Tahun	76.500.000	1 Tahun	79.950.000	1 Tahun	80.000.000								3 tahun	236.450.000	dkumpp	KKR
		0209	Rapat-empat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-empat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	125.050.000	1 Tahun	197.300.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	300.000.000								3 tahun	647.300.000	dkumpp	KKR
		0210	Rapat-empat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat-empat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tahun	46.468.700	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	100.000.000								3 tahun	225.000.000	dkumpp	KKR
		0211	Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM	Jumlah Rapat koordinasi pembangunan Koperasi dan UMKM	Tahun	-	1 Tahun	42.500.000	1 Tahun	49.995.000	1 Tahun	50.000.000								3 tahun	142.495.000	dkumpp	KKR
		0212	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	Tahun	15.000.000	1 Tahun	13.000.000	1 Tahun	9.000.000	1 Tahun	9.000.000								3 tahun	31.000.000	dkumpp	KKR
		0213	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tahun	83.400.000	1 Tahun	89.670.000	1 Tahun	119.400.000	1 Tahun	200.000.000								3 tahun	409.070.000	dkumpp	KKR
		3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100%	774.809.000	100%	455.387.150	100%	590.850.000								100%	1.820.966.150	dkumpp	KKR
		0301	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tahun	-	-	-	1 tahun	35.000.000	1 tahun	100.000.000								1 tahun	135.000.000	dkumpp	KKR
		0302	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	-	-	-	6 UNIT	38.300.000	6 unit	60.000.000								6 unit	98.300.000	dkumpp	KKR
		0303	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	30.000.000	8 unit	97.934.000	8 UNIT	80.850.000	8 unit	80.850.000								24 unit	259.634.000	dkumpp	KKR
		0304	Pengadaan mebelur	Jumlah Pengadaan mebelur	Tahun	-	1 tahun	45.650.000	-	-	1 tahun	30.000.000								3 tahun	75.650.000	dkumpp	KKR
		0305	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	-	1 paket	413.225.000	1 PAKET	96.500.000	1 PAKET	200.000.000								3 paket	709.725.000	dkumpp	KKR
		0306	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	113.000.000	4 unit	135.000.000	4 UNIT	140.000.000	4 UNIT	60.000.000								12 unit	335.000.000	dkumpp	KKR
		0307	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Unit	-	14 unit	15.000.000	14 UNIT	15.000.000	14 UNIT	20.000.000								42 unit	50.000.000	dkumpp	KKR
		0308	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan lainnya	Tahun	25.000.000	1 tahun	33.000.000	1 tahun	49.657.150	1 Tahun	40.000.000								15 tahun	122.657.150	dkumpp	KKR
		0309	Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Jumlah Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Tahun	-	1 tahun	35.000.000	-	-	-	-								1 tahun	35.000.000	dkumpp	KKR
		4	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	100%	100%	32.106.000	100%	70.700.000	100%	-								100%	102.806.000	dkumpp	KKR
		0401	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	0	69 stel	32.106.000	58 STEL	70.700.000	-	-								127 Paket	102.806.000	dkumpp	KKR
		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100%	100%	25.950.000	100%	25.800.000	100%	50.000.000								100%	101.750.000	dkumpp	KKR
		0503	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	37.200.000	2 orang	25.950.000	2 ORANG	25.800.000	2 ORANG	50.000.000								6 orang	101.750.000	dkumpp	KKR
		0504	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD		-	-	-	-	-	-	-								-	-	dkumpp	KKR
		6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	%	100%	100%	82.528.800	100%	56.975.000	100%	70.000.000								100%	209.501.800	dkumpp	KKR
		0601	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.750.000	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	15.000.000								3 dokumen	43.250.000	dkumpp	KKR
		0602	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dokumen	10.000.000	1 dokumen	8.167.100	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000								3 dokumen	28.167.100	dkumpp	KKR
		0603	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	10.000.000	1 dokumen	14.750.900	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000								3 dokumen	34.750.900	dkumpp	KKR
		0604	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen	10.000.000	4 dokumen	20.100.800	4 dokumen	11.975.000	4 dokumen	20.000.000								12 dokumen	60.083.800	dkumpp	KKR
		0605	Penyusunan LPPD	Jumlah dokumen Penyusunan LPPD	Dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.750.000	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	10.000.000								3 dokumen	43.250.000	dkumpp	KKR
		7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Kegiatan Waktu Penyempalan Laporan Keuangan	%	100%	100%	51.375.000	100%	44.000.000	100%	50.000.000								100%	145.375.000	dkumpp	KKR
		0701	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan SKPD	Orang	52.000.000	4 ORANG	51.375.000	4 ORANG	44.000.000	4 ORANG	50.000.000								12 orang	145.375.000	dkumpp	KKR
		8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	%	100%	100%	20.800.000	100%	-	-	-								100%	20.800.000	dkumpp	KKR

		0801	Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	Tahun	6.000.000	1 tahun	20.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	20.800.000	dkumpp	KKR
		9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	%	100%	100%	64.544.900	100%	9.000.000	100%	10.000.000	-	-	-	100%	83.544.900	dkumpp	KKR
		0902	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	1 dokumen	57.575.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	57.575.000	dkumpp	KKR
		0904	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Dokumen	7.000.000	1 dokumen	6.969.900	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	10.000.000	-	-	-	3 Dokumen	25.969.900	dkumpp	KKR
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro Kecil	10	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM Yang Mendapat Pelatihan dan Bantuan	UMKM	100	100	146.627.000	0	-	0	100.000.000	-	-	-	100	246.627.000	DKUMPP	KKR
		1001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMKM	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran UMKM	Unit	-	18 Gerekah PKL	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	18 gerekah pkl	100.000.000	DKUMPP	KKR
		1002	Workshop Penyempurnaan Kemasan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Jumlah Workshop Penyempurnaan Kemasan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Workshop	-	1 KALI WORKSHOP	46.627.000	-	-	-	-	-	-	-	1 kali workshop	46.627.000	DKUMPP	KKR
		1103	Pelatihan Keterampilan UMKM	Jumlah Pelatihan Keterampilan UMKM	Tahun	-	0	-	-	-	1Tahun	100.000.000	-	-	-	1 Tahun	100.000.000	-	-
		16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi	UMKM	100	100	444.621.700	100	301.480.000	100	375.000.000	-	-	-	300	1.121.101.700	DKUMPP	KKR
		1605	Facilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Pjumlah emasaran bagi produk UMKM	Kali	103.800.000	2 kali	294.908.500	3 kali	197.150.000	3 kali	300.000.000	-	-	-	8 kali	792.058.500	DKUMPP	KKR
		1601	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	Koperasi	24.000.000	8 kecamatan	35.000.000	10 koperasi	34.075.000	-	-	-	-	-	18 koperasi	69.075.000	DKUMPP	KKR
		1614	Biometre Kemitraan Koperasi dan UMKM	Jumlah Biometre Kemitraan Koperasi dan UMKM	Koperasi	-	55 koperasi	37.910.200	45 koperasi	30.655.000	-	-	-	-	-	100 koperasi	68.565.200	DKUMPP	KKR
		1618	Penilaian kesetiaan koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah	Jumlah Lokasi Penilaian kesetiaan koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah	Kecamatan	20.000.000	8 kecamatan	20.000.000	5 kecamatan	13.075.000	-	-	-	-	-	13 kecamatan	33.075.000	DKUMPP	KKR
		1622	Biometre Manajemen Usaha bagi UMKM Kab Kulu Raya	Jumlah usaha mikro yang mengikuti Biometre Manajemen Usaha bagi UMKM Kab Kulu Raya	UMKM	-	100 umkm	56.803.000	50 umkm	26.525.000	50 umkm	75.000.000	-	-	-	200 umkm	158.328.000	DKUMPP	KKR
		17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM Yang Melakukan Kemitraan	UMKM	100	100	442.069.000	100	120.275.000	100	50.000.000	-	-	-	300	236.147.000	DKUMPP	KKR
		1711	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembiayaan pemodal	Jumlah pelaku usaha mikro	UMKM	30.000.000	8 Umkm	35.000.000	9 UMKM	18.450.000	-	-	-	-	-	17 umkm	53.450.000	DKUMPP	KKR
		1723	Pemberdayaan usaha mikro pasca legalisasi SEHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan usaha mikro pasca legalisasi SEHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)	UMKM	55.000.000	50 umkm	30.872.000	50 umkm	36.125.000	-	-	-	-	-	100 umkm	66.997.000	DKUMPP	KKR
		1724	Sosialisasi pendampingan dan pengawasan KUR	Jumlah Sosialisasi pendampingan dan pengawasan KUR	UMKM	-	-	-	-	-	150 umkm	50.000.000	-	-	-	150 UMKM	50.000.000	DKUMPP	KKR
		1726	pendampingan kerjasama pemasaran produk UMKM	Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama antar daerah	Produk	-	-	-	20 PRODUK	65.700.000	-	-	-	-	-	20 produk	65.700.000	DKUMPP	KKR
		18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rasio Jumlah Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi	%	100%	100%	188.098.500	100%	109.575.000	100%	35.000.000	-	-	-	100%	332.673.500	DKUMPP	KKR
		1805	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Pembinaan,Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Koperasi	-	55 koperasi	35.950.000	-	-	-	-	-	-	-	55 koperasi	35.950.000	DKUMPP	KKR
		1801	Pelatihan manajemen Keuangan Koperasi	Jumlah peningkatan SDM koperasi	Koperasi	28.747.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKUMPP	KKR
		1811	Penguatan pemberdayaan dan revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	Jumlah kegiatan Penguatan pemberdayaan dan revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	Koperasi	61.667.500	90 koperasi	48.082.500	40 koperasi	58.875.000	-	-	-	-	-	130 Koperasi	106.957.500	DKUMPP	KKR
		1813	Hari Peningkatan Koperasi	Jumlah koperasi sehat yang mendapat penghargaan	Koperasi	43.142.000	70 koperasi	45.433.000	50 koperasi	25.350.000	-	-	-	-	-	120 Koperasi	70.783.000	DKUMPP	KKR
		1817	Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM	Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM	Dokumen	62.549.500	1 dokumen	58.633.000	1 dokumen	25.350.000	-	-	-	-	-	2 Dokumen	83.983.000	DKUMPP	KKR
		1819	Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi	-	-	-	-	-	10 koperasi	35.000.000	-	-	-	10 Koperasi	35.000.000	DKUMPP	KKR
	Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	306	Urutan Perdagangan																
		18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Formal yang Mendapatkan Izin Usaha	Pelaku Usaha	50	60	475.171.900	70	437.293.400	80	470.000.000	-	-	-	210	1.382.465.300	DKUMPP	KKR
		1802	Facilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha	Dokumen	49.015.500	20 dokumen	164.158.000	20 DOKUMEN	118.569.300	-	-	-	-	-	40 dokumen	282.727.300	DKUMPP	KKR
		1803	Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk	Jumlah Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk	Dokumen	-	2 dokumen	62.694.000	2 DOKUMEN	56.700.000	-	-	-	-	-	4 Dokumen	119.394.000	DKUMPP	KKR
		1808	Monitoring tentang Pengembangan Harga Sembako, Barang Penting dan Barang Umum lainnya	Jumlah kegiatan pengawasan harga dan barang kebutuhan pokok/barang penting lainnya	Laporan	115.597.000	12 Laporan	164.153.900	12 Laporan	203.574.800	12 Laporan	250.000.000	-	-	-	36 Laporan	617.728.700	DKUMPP	KKR
		1809	pasar murah	Jumlah kegiatan pasar murah	Pelaku Usaha	-	30 Pelaku usaha	72.590.000	30 Pelaku usaha	48.050.000	30 Pelaku usaha	100.000.000	-	-	-	90 Pelaku Usaha	220.640.000	DKUMPP	KKR
		1801	Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyuluhan dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyuluhan dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	Laporan	8.983.500	1 Laporan	11.576.000	1 LAPORAN	10.399.300	1 LAPORAN	20.000.000	-	-	-	3 Laporan	41.975.300	DKUMPP	KKR
		1811	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Jumlah Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	DKUMPP	KKR
		19	Program pembinaan pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Kali	2	4	2.556.082.875	6	158.658.200	8	375.000.000	-	-	-	18	3.089.741.875	DKUMPP	KKR
		1903	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pasar	-	-	-	4 PASAR	158.658.200	4 PASAR	250000000	-	-	-	8 pasar	408.658.200	DKUMPP	KKR
		1909	Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Pasar/Pedagang	Jumlah Pembangunan Pasar Tradisional dan Pendataan Pasar/Pedagang	Pasar	5.985.138.175	1 Pasar	2.556.082.875	-	-	-	-	-	-	-	1 pasar	2.556.082.875	DKUMPP	KKR
		1912	Facilitasi lokasi pedagang kaki lima	Jumlah fasilitas lokasi pedagang kaki lima	Pasar	-	-	-	-	-	1 Pasar	125000000	-	-	-	1 pasar	125.000.000	DKUMPP	KKR
		20	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya)	Kali	5	5	257.872.600	5	245.875.600	5	350.375.100	-	-	-	15	854.123.300	DKUMPP	KKR
		2002	Verifikasi Alat-alat Standar	Jumlah Verifikasi Alat-alat Standar	Unit	44.500.000	70 Unit	75.217.000	70 Unit	45.500.600	70 Unit	67.125.600	-	-	-	210 Unit	187.843.200	DKUMPP	KKR
		2003	Pelaksanaan sensus dan Penyusunan Data Base Metrologi	Jumlah Pelaksanaan sensus dan Penyusunan Data Base Metrologi	Kecamatan	-	-	-	4 KECAMATAN	8.565.300	4 KECAMATAN	18.565.000	-	-	-	8 kecamatan	27.130.500	DKUMPP	KKR
		2004	Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi Kemetrologian	Jumlah Pertemuan Teknis Kemetrologian dan Forum Konsultasi Kemetrologian	Orang	-	-	-	4 ORANG	16.050.000	4 ORANG	24.075.000	-	-	-	8 orang	40.125.000	DKUMPP	KKR
		2005	Diklat Aparatur Metrologi	Jumlah ASN Diklat Aparatur Metrologi	Orang	20.250.000	6 orang	21.550.000	2 ORANG	28.800.000	2 ORANG	28.800.000	-	-	-	10 orang	79.150.000	DKUMPP	KKR
		2012	Penyediaan Peralatan Standar dan Pelengkapan Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Jumlah Penyediaan Peralatan Standar dan Pelengkapan Pelayanan Tera dan Tera Ulang		46.893.500	1 Tahun	-	1 Tahun	-	0	-	-	-	-	0	DKUMPP	KKR	
		2014	Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	Jumlah kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	Unit	117.210.000	500 Unit	107.505.600	500 Unit	92.872.900	500 Unit	157.722.900	-	-	-	1500 Unit	358.101.400	DKUMPP	KKR

		20:16	Pengelolaan Laboratorium	Jumlah Pengelolaan Laboratorium	Orang	50.000.000	2 Orang	53.600.000	2 ORANG	54.086.600	2 ORANG	54.086.600							6 orang	161.773.200	DKUMPP	KKR
		387	Urusan Perindustrian																			
		18	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Peningkatan Penataan Struktur Industri	%	100%	100%		100%	57.451.950	100%	74.242.950							100%	131.694.900	DKUMPP	KKR
		18:04	Monitoring dan Evakuasi Industri	Jumlah industry kecil menengah yang di monitoring	IKM	-	-	-	30 IKM	28.754.000	30 IKM	45.545.000							60 IKM	74.299.000	DKUMPP	KKR
		18:01	Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM	Jumlah Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM	IKM	-	-	-	35 ORANG	28.697.950	35 ORANG	28.697.950							70 orang	57.395.900	DKUMPP	KKR
		19	Program pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra Industri Potensial yang Mendapat Fasilitas	Sentra Industri	5	5	427.924.500	5	386.757.700	5	500.000.000							15	1.314.682.200	DKUMPP	KKR
		19:03	Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Inacraft dan Pameran di Luar Provinsi Kalbar	Pameran	155.489.000	1 kali pameran	123.624.500	2 kali pameran	153.175.700	2 kali pameran	150.000.000							5 kali pameran	426.800.200	DKUMPP	KKR
		19:04	Bimtek Pengembangan Design Kerajinan	Jumlah pelaku industry kecil menengah yang dilatih	Kali	-	-	-	2 KALI	38.500.000	2 KALI	100.000.000							4 Kali	138.500.000	DKUMPP	KKR
		19:09	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Jumlah pameran yang difasilitasi	Kali	143.911.500	2 kali	216.850.000	2 kali	195.082.000	2 kali	250.000.000							6 Kali	661.932.000	DKUMPP	KKR
		19:21	Penyusunan Data Base Industri Kecil Menengah	Jumlah Penyusunan Data Base Industri Kecil Menengah	Dokumen	-	1 Dokumen	45.950.000	-	-	-	-							1 Dokumen	45.950.000	DKUMPP	KKR
		19:22	Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Rapid)	Jumlah Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah (Rapid)	Dokumen	-	1 Dokumen	41.500.000	-	-	-	-							1 Dokumen	41.500.000	DKUMPP	KKR

PERMENDAGRI NO 90 - KEPMENDAGRI 050_5889

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
Meningkatkan	Meningkatnya	401 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE KUALITAS KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	100%	100%		100%	6.832.696.700	100%	6.879.880.517	100%	6.876.700.000	100%	7.729.330.587	100%	28.318.607.804	DKUMPP	KKR		
		01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%			100%	50.000.000	100%	51.500.000	100%	55.000.000	100%	62.150.000	100%	218.650.000	DKUMPP	KKR		
		01 2.01 01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen RKA, DPA, DPP	Dokumen	10.000.000				4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000			8 dokumen	40.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen									5 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	24.200.000	9 dokumen	59.200.000	DKUMPP	KKR	
		01 2.01 06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	10.000.000				1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000			2 Dokumen	31.500.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan									1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	19.800.000	2 Laporan	29.800.000	DKUMPP	KKR	
		01 2.01 07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10.000.000				1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000			2 Dokumen	30.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen									1 Dokumen	10.000.000	1 Laporan	18.150.000	2 Dokumen	28.150.000	DKUMPP	KKR	
		01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%				100%	4.778.946.700	100%	4.542.440.517	100%	5.822.800.000	100%	5.013.240.587	100%	19.356.627.804	DKUMPP	KKR	
		01 2.02 01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan					42 Orang/Bulan	4.758.946.700	42 Orang/Bulan	4.522.440.517			84 Orang/Bulan	9.281.387.217	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan									40 Orang/Bulan	5.000.000.000	40 Orang/Bulan	4.989.040.587	80 Orang/Bulan	9.989.040.587	DKUMPP	KKR	
		01 2.02 05	2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	10.000.000				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000			2 Dokumen	20.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan									1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.100.000	2 Laporan	22.100.000	DKUMPP	KKR	
		01 2.02 07	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	10.000.000				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000			2 Dokumen	20.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Laporan									13 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.100.000	14 Laporan	24.100.000	DKUMPP	KKR	
		01 02-95	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%				100%	110.000.000	100%	121.800.000	100%	203.200.000	100%	215.900.000	100%	658.100.000	DKUMPP	KKR	
		01 02:05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKUMPP	KKR	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket									2 Paket	70.700.000	2 Paket	70.700.000	4 Paket	141.400.000	DKUMPP	KKR	
		01 02:05 09	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-								Orang	-	Orang	-	Orang	-	DKUMPP	KKR	
		01 02:05 10	3 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Dokumen	24.000.000				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000			2 Dokumen	21.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen									1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.200.000	2 Dokumen	25.200.000	DKUMPP	KKR	
		01 02:05 11	4 Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Orang	89.200.000				6 Orang	100.000.000	6 Orang	110.000.000			12 Orang	210.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang									6 Orang	120.500.000	6 Orang	132.000.000	12 Orang	252.500.000	DKUMPP	KKR	
		01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat daerah	%	100%				100%	621.500.000	100%	683.600.000	100%	303.500.000	100%	822.170.000	100%	2.430.770.000	DKUMPP	KKR	
		01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Paket	3.000.000				1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000			2 Paket	21.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket									12 Paket	10.000.000	1 Paket	11.300.000	13 Paket	21.300.000	DKUMPP	KKR	
		01 2.06 04	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket					2 Tahun	130.000.000	2 Tahun	143.000.000			4 Tahun	273.000.000	DKUMPP	KKR			
				Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Paket	55.000.000														DKUMPP	KKR	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket									12 Paket	120.000.000	2 Paket	171.000.000	14 Paket	291.000.000	DKUMPP	KKR	

SKPD	Keuangan	01	2.06	05	3	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan barang cetakan dan Penggandaan	Dokumen		10.000.000					1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	33.000.000					2 Tahun\	63.000.000	DKUMPP	KKR		
		01	2.06	06	4	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggahan yang Disediakan	Dokumen							1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	1.600.000	12 Dokumen	22.000.000	12 Dokumen	40.000.000	24 Dokumen	62.000.000	DKUMPP	KKR		
							Jumlah Persediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tahun		1.020.000														2 Tahun	3.100.000	DKUMPP	KKR	
		01	2.06	09	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen											375 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.870.000	376 Dokumen	3.370.000	DKUMPP	KKR		
							Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi sedalam daerah	Laporan		171.518.700					3 Tahun	450.000.000	3 Tahun	495.000.000							6 Tahun	945.000.000	DKUMPP	KKR
							Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dihadiri	Laporan																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan											119 Laporan	150.000.000	3 Laporan	598.000.000	122 Laporan	748.000.000	DKUMPP	KKR		
		01	2.87			Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		n/a						26	279.850.888	26	297.888.888	28	481.000.000	18	429.228.000	98	1.398.878.000	DKUMPP	KKR	
		01	2.07	02	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit								1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	110.000.000					2 Tahun	210.000.000	DKUMPP	KKR	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-										2 Unit	121.000.000	2 Unit	133.100.000	4 Unit	254.100.000	DKUMPP	KKR	
01	2.07	05	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel/Meja	Paket								2 Unit	30.000.000	2 Unit	33.000.000					4 unit	63.000.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		-										2 Unit	100.000.000	2 Unit	110.000.000	4 Unit	210.000.000	DKUMPP	KKR			
01	2.07	06	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit								8 Unit	80.850.000	8 Unit	88.000.000					16 Unit	168.850.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		30.000.000											6 Unit	100.000.000	8 Unit	106.260.000	14 Unit	206.260.000	DKUMPP	KKR		
01	2.07	10	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit								6 Unit	60.000.000	6 Unit	66.000.000					12 Unit	126.000.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-										10 Unit	80.000.000	6 Unit	79.860.000	16 Unit	159.860.000	DKUMPP	KKR			
01	2.88			Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa	Laporan		n/a						48	672.400.000	48	733.348.000	24	378.000.000	24	584.200.000	144	2.359.948.000	DKUMPP	KKR			
01	2.08	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar yang dikirim	Tahun								1 Tahun	151.200.000	1 Tahun	166.320.000					2 Tahun	317.520.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun		-										Laporan	-	Laporan	-		-	DKUMPP	KKR			
01	02.08	02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan								1 Tahun	151.200.000	1 Tahun	166.320.000					2 Tahun	317.520.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		116.400.000										12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	198.000.000	24 Laporan	298.000.000	DKUMPP	KKR			
01	02.08	04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan																						
					Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Laporan		217.400.000						2 Tahun	370.000.000	2 Tahun	400.700.000					5 Tahun	770.700.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan												12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	386.200.000	24 Laporan	656.200.000	DKUMPP	KKR			
01	02.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		n/a						71	329.000.000	71	451.000.000	132	522.000.000	121	682.450.000	395	1.984.458.000	DKUMPP	KKR			
01	02.09	02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Operasional	Unit								4 Unit	69.000.000	4 Unit	165.000.000					2 Tahun / 8 Unit	234.000.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		128.000.000																				
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	Unit												17 Unit	150.000.000	17 Unit	199.650.000	34 Unit	349.650.000	DKUMPP	KKR			
01	02.09	09	2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit								1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000					2 Paket	420.000.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit		-										25 Unit	242.000.000	25 Unit	266.200.000	50 Unit	508.200.000	DKUMPP	KKR			
01	02.09	10	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Unit								14 Unit	20.000.000	14 Unit	22.000.000					24 Unit	42.000.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit		-										25 Unit	30.000.000	14 Unit	26.600.000	39 Unit	56.600.000	DKUMPP	KKR			
01	02.09	11	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan lainnya	Unit								1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	44.000.000					2 Tahun	84.000.000	DKUMPP	KKR			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit		25.000.000										65 Unit	100.000.000	65 Unit	110.000.000	130 Unit	210.000.000	DKUMPP	KKR			
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																							
		2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERTUMBUHAN KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM			-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	400%	-	DKUMPP	KKR			
		2	17	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagamaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagamaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	1	-	1	-	100%	-	100%	-	400%	-	DKUMPP	KKR		
		2	17	02	2.01	01	01	01		-								Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	DKUMPP	KKR			
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keagamaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagamaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-																			
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%		n/a	100%	-	100%	-	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	167.408.000	DKUMPP	KKR			
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keagamaan Dalam Daerah	Persentase Peningkatan Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	%		n/a	100%	-	100%	-	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	92.408.000	DKUMPP	KKR			
		2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguban serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguban, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	DKUMPP	KKR			
		2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi aktif dan sehat	Unit Usaha						10 Koperasi	35.000.000	10 Koperasi	40.000.000					20 Koperasi	75.000.000	DKUMPP	KKR		
							Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha		-								10 Koperasi	44.000.000	10 Koperasi	48.400.000	20 Koperasi	92.400.000	DKUMPP	KKR			

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif dan Usaha Mikro Kecil	2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI	PERSENTASE KOOPERASI YANG SEHAT	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	119.300.000	DKUMPP	KKR	
		2	17	04	2.01	Pemilahan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Koperasi yang difasilitasi	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	119.300.000	DKUMPP	KKR
		2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dapat penghargaan	Unit Usaha	63.142.000				50 Koperasi	20.000.000	50 Koperasi	30.000.000		33.000.000	50 Koperasi	36.300.000	100 Koperasi	50.000.000	DKUMPP	KKR
					Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha																			
		2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOOPERASI YANG MENGIKUTI DIKLAT PERKOPERASIAN	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	172.400.000	DKUMPP	KKR	
		2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	172.400.000	DKUMPP	KKR
		2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	Orang	28.747.500			40 Koperasi	40.000.000	40 Koperasi	40.000.000		44.000.000	40 Koperasi	48.400.000	80 Koperasi	80.000.000	DKUMPP	KKR	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang																			40 Koperasi
		2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	84.225.000	100%	86.000.000	100%	94.600.000	100%	104.060.000	100%	368.885.000	DKUMPP	KKR	
		2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan dan perlindungan	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	84.225.000	100%	86.000.000	100%	94.600.000	100%	104.060.000	100%	368.885.000	DKUMPP	KKR
		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diversifikasi dan Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Koperasi	Orang	124.217.000			40 Koperasi	84.225.000	40 Koperasi	86.000.000		94.600.000	40 Koperasi	104.060.000	80 Koperasi	170.225.000	DKUMPP	KKR	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang																			40 Koperasi
		2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENINGKAT USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	PERSENTASE PELAKU USAHA MIKRO YANG BERUSAHA	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	1.260.000.000	DKUMPP	KKR	
		2	17	07	2.01	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	1.260.000.000	DKUMPP	KKR
		2	17	07	2.01	01	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mendapatkan Bantuan Pemodalahan	Unit Usaha	70.850.000				9 UMKM	50.000.000	9 UMKM	55.000.000		50 Unit Usaha	250.000.000	50 Unit Usaha	275.000.000	100 unit Usaha	525.000.000	DKUMPP	KKR
					Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi pembiayaan serta yang menerima bantuan pemodalahan	Unit Usaha																			
		2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas	Orang	55.000.000			200 UMKM	150.000.000	200 UMKM	165.000.000		15 Orang	150.000.000	15 Orang	165.000.000	30 Orang	315.000.000	DKUMPP	KKR
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang																			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	625.000.000	100%	687.500.000	100%	756.250.000	100%	831.875.000	100%	2.900.625.000	DKUMPP	KKR			
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	625.000.000	100%	687.500.000	100%	756.250.000	100%	831.875.000	100%	2.900.625.000	DKUMPP	KKR		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemanaan, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro	Unit Usaha	103.800.000			50 Unit Usaha	625.000.000	50 Unit Usaha	687.500.000		50 Unit Usaha	756.250.000	50 Unit Usaha	831.875.000	100 Unit Usaha	1.588.125.000	DKUMPP	KKR		
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan pengelolaan, Pemanaan, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha																					

Peningkatan Sistem Distribusi dan Pengawasan Peredaran Barang Jasa dan Perlindungan Konsumen serta Penguatan Sektor Ekspor Import	Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam/Negeri	3	30	01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
		3	30	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																					
		3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMILIKI IZIN	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	349.999.500	100%	385.000.000	100%	423.500.000	100%	465.850.000	100%	1.624.349.500	DKUMPP	KKR		
		3	30	02	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Izin	Dokumen	n/a	-	-	-	-	20	250.000.000	20	275.000.000	20	302.500.000	20	332.750.000	80	1.160.250.000	DKUMPP	KKR	
		3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Penemuan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin	Dokumen	49.015.500			20 Dokumen	250.000.000	20 Dokumen	275.000.000		20 Dokumen	302.500.000	20 Dokumen	332.750.000	40 Dokumen	635.250.000	DKUMPP	KKR	
					Jumlah Rekomendasi Penemuan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen																				
		3	30	02	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Terdaftar	%	n/a	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	-									Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		3	30	02	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengamanan	Jumlah pengawasan untuk pelaku usaha	%	n/a	100%	-	100%	-	2	99.999.500	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	8	464.899.500	DKUMPP	KKR	
		3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan terhadap bahan berbahaya	Dokumen				2 Dokumen	99.999.500	2 Dokumen	110.000.000			2 Dokumen	121.000.000	2 Dokumen	133.100.000	4 Dokumen	254.100.000	DKUMPP	KKR
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Dokumen																				
		3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	375.000.000	100%	412.500.000	100%	453.750.000	100%	499.125.000	100%	1.740.375.000	DKUMPP	KKR		
		3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	n/a	-	-	-	-	5	375.000.000	5	412.500.000	5	453.750.000	5	499.125.000	20	1.740.375.000	DKUMPP	KKR	
		3	30	03	2.01	01	Persediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemetaan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Anjungan	Unit	5.985.130.175			5 Pasar	375.000.000	5 Pasar	412.500.000		5 Pasar	453.750.000	5 Pasar	499.125.000	10 Pasar	952.875.000	DKUMPP	KKR	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit																				
		3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KESEKABILAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	470.000.000	100%	517.000.000	100%	568.700.000	100%	625.570.000	100%	2.181.270.000	DKUMPP	KKR				
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Kesekabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	n/a	100%	-	100%	-	100%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	544.500.000	100%	598.950.000	100%	2.088.450.000	DKUMPP	KKR			
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah kegiatan pengawasan harga dan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting	Laporan	115.997.000			12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	385.000.000		24 Laporan	735.000.000	DKUMPP	KKR							
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan																						

		3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Laporan	36.901.000					1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000					2 Laporan	210.000.000	DKUMPP	KKR	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan						1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	2 Laporan	254.100.000	DKUMPP	KKR						
		3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	%	n/a				100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	92.820.000	DKUMPP	KKR		
		3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyiaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyiaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	8.983.500				1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000					2 Laporan	42.000.000	DKUMPP	KKR		
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyiaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan						1 Laporan	24.200.000	1 Laporan	26.620.000	2 Laporan	50.820.000	DKUMPP	KKR					
		3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERASAH YANG BERLAKU	%	n/a	100%			100%	-	100%	296.288.500	100%	319.000.000	100%	350.900.000	100%	385.990.000	100%	1.352.178.500	DKUMPP	KKR
		3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Tera, Tera ulang dan Pengawasan	Unit	n/a	100%		-	100%	-	550	296.288.500	550	319.000.000	550	350.900.000	550	385.990.000	2200	1.352.178.500	DKUMPP	KKR
		3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang berupa pemeriksaan hasil pengukuran	Unit	228.853.500						550 Unit	296.288.500	550 Unit	319.000.000					1100 Unit	615.288.500	DKUMPP	KKR
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	Unit							550 Unit	350.900.000	550 Unit	385.990.000	1100 Unit	736.890.000	DKUMPP	KKR				
		3 30 06 2.01 02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	-									Orang	-	Orang	-	Orang	-	DKUMPP	KKR	
		Meningkatkan dan Mengembangkan Produk-Produk Kerajinan IKM	Meningkatkan dan Mengembangkan Produk-Produk Kerajinan IKM	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
				3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN INDUSTRI	%	n/a	100%		-	100%	-	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	457.600.000	100%	503.360.000	100%	1.695.960.000	DKUMPP	KKR
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Persentase Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Industri	%	n/a	100%		-	100%	-	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	457.600.000	100%	503.360.000	100%	1.695.960.000	DKUMPP	KKR
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah pelaku IKM yang dilatih, jumlah pelatihan pengembangan sentra-sentra industri potensial dan jumlah pameran yang difasilitasi	Dokumen	143.911.500						1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	385.000.000					2 Dokumen	735.000.000	DKUMPP	KKR
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen							1 Dokumen	457.600.000	1 Dokumen	503.360.000	2 Dokumen	960.960.000	DKUMPP	KKR				
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			PERSENTASE PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	%	n/a	100%		-	100%	-	100%	74.242.950	100%	81.000.000	100%	236.500.000	100%	260.150.000	100%	651.892.950	DKUMPP	KKR
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kawasan Kabupaten/Kota			Persentase Peningkatan jumlah Data Perumahan Industri	%	n/a	100%		-	100%	-	100%	74.242.950	100%	81.000.000	100%	236.500.000	100%	260.150.000	100%	651.892.950	DKUMPP	KKR
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah industry kecil menengah yang di monitoring	Dokumen	155.489.000						4 Dokumen	45.545.000	4 Dokumen	50.000.000					8 Dokumen	95.545.000	DKUMPP	KKR
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen							4 Dokumen	181.500.000	4 Dokumen	199.650.000	8 Dokumen	381.150.000	DKUMPP	KKR				
3 31 04 2.01 02	Dieminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			Jumlah Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM	Dokumen	-						4 Dokumen	28.697.950	4 Dokumen	31.000.000					8 Dokumen	59.697.950	DKUMPP	KKR
				Jumlah Dokumen Hasil Dieminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen							4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	60.500.000	8 Dokumen	115.500.000	DKUMPP	KKR				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 **”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**, Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) ;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat ;
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal ;
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat ;
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)

Tujuan

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

2. **Misi 2** : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

Sasaran

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian				SKPD yang Bertanggung Jawab			
										2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)	T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi				-	CC	CC	B	B	B	B	DKUMPP			
						S.1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	DKUMPP	
						S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	Nilai SAKIP	-	CC	CC	B	B	B		BB		DKUMPP
								3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		
		T.4	Meningkatnya kualitas perekonomian daerah	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi				%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	DKUMPP			
				5	Angka Kemiskinan				%	4,74	4,42	4,39	4,16	4,03	3,97	DKUMPP			
						S.7	Meningkatnya daya saing daerah	11	Pertumbuhan PDRB	%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	DKUMPP		
						S.8	Meningkatnya sektorUMKM	12	Laju pertumbuhan UMKM	Omset	8.035.540.000	13.451.800.000	45.430.612.675	54.971.041.337	60.468.145.470	66.514.960.017	DKUKMPP		

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, memuat antara lain tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi, yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya).

Apabila sampai berakhirnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini, belum ditetapkannya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya periode berikutnya, maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya ini masih digunakan untuk penyusunan renja tahun perencanaan berikutnya.